



#kerja**3**ersama

BIDANG PEREKONOMIAN

Pembangunan Ekonomi Baru dan Peningkatan Produktivitas Untuk Menunjang Pemerataan

17 Oktober 2017

OUTLINE



KINERJA EKONOMI MAKRO (4 slide)

PENINGKATAN DAYA SAING MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN DEREGULASI (3 slide)

PEMERATAAN EKONOMI MELALUI PEMBANGUNAN EKONOMI BARU DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS (9)

- **PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU**
- **PENINGKATAN PRODUKTIVITAS**

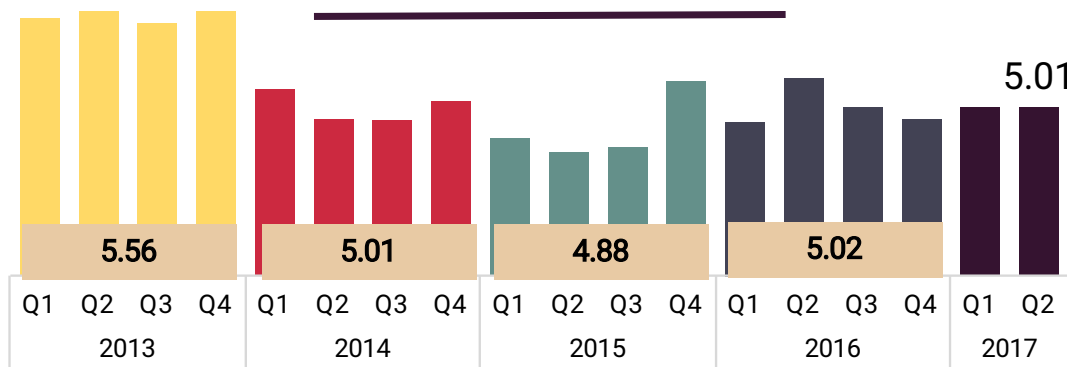
KINERJA EKONOMI MAKRO

PERTUMBUHAN EKONOMI TETAP TINGGI DENGAN INDIKATOR SOSIAL MEMBAIK

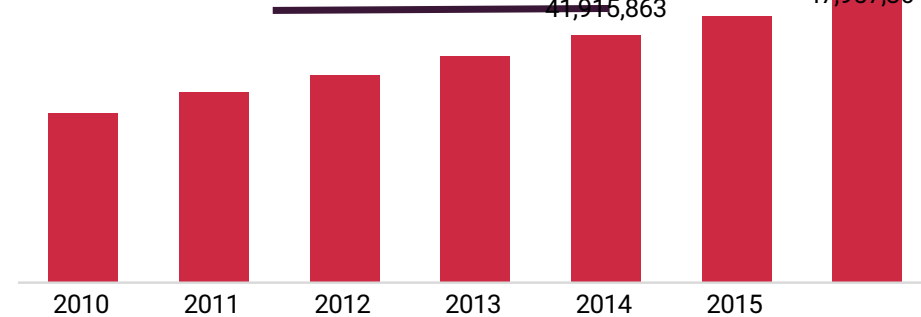


Pertumbuhan ekonomi berada dalam kisaran 5 persen dan telah berhasil menurunkan tingkat ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan

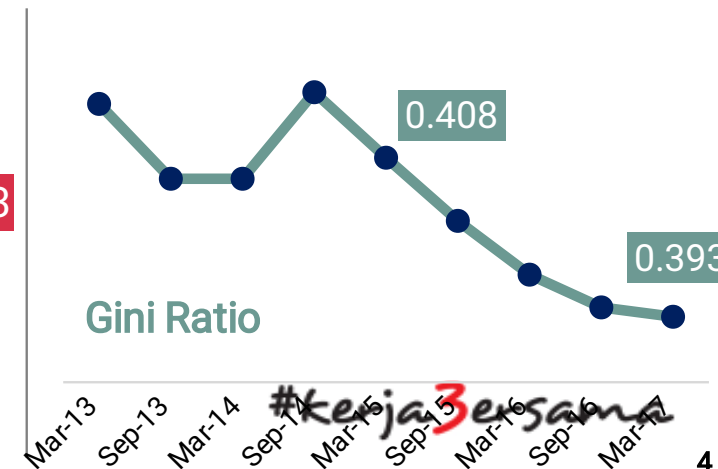
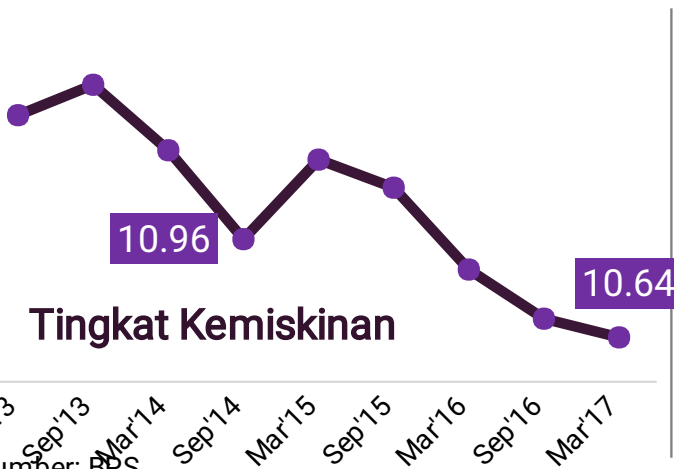
Pertumbuhan Ekonomi (%)



PDB Per Kapita (Rp)



Indikator Sosial



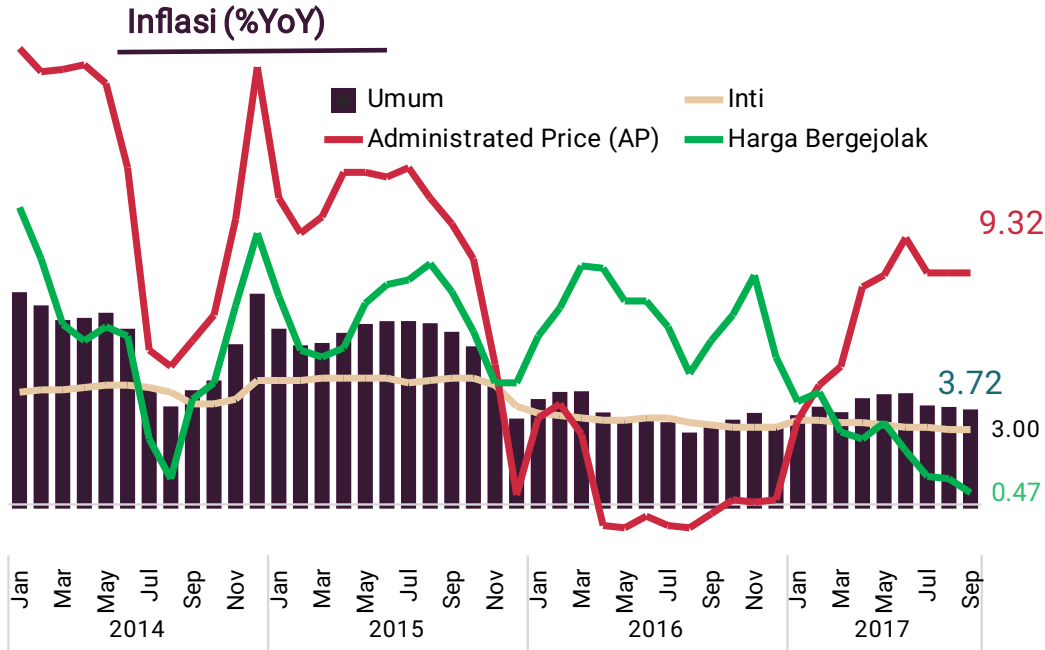
Sumber: BPS

#Kerjasama

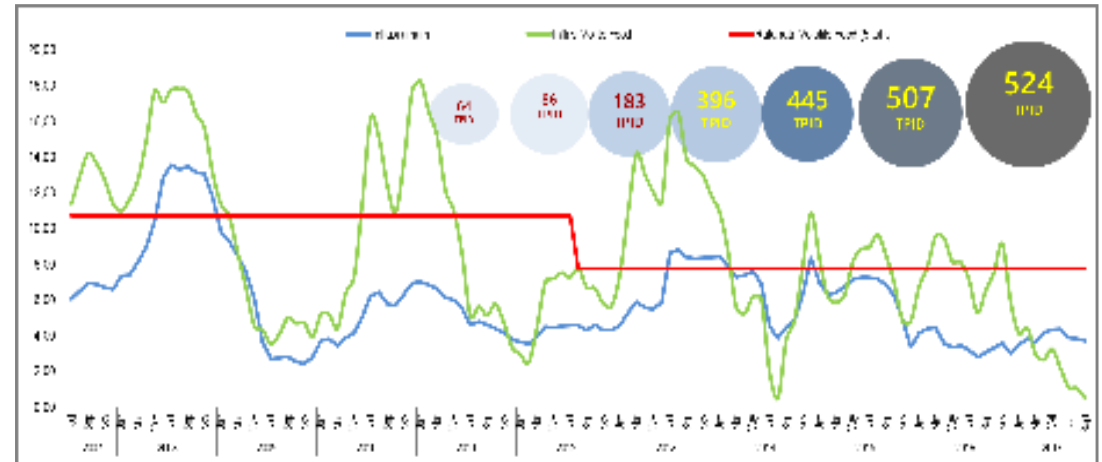
INFLASI MENURUN



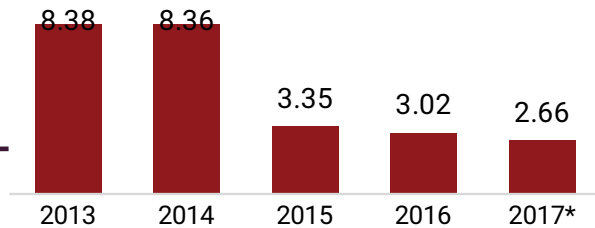
Dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi, laju inflasi menurun dari 4,49%YoY pada September 2014 menjadi 3,72 %YoY pada September 2017. Realisasi inflasi 2017 juga diperkirakan berada dalam kisaran sasaran ($4\% \pm 1$). Inflasi pangan (VF) dari tahun ke tahun lebih terkendali sejalan dengan perkembangan jumlah TPID.



Perkembangan Jumlah TPID s.d September 2017



Inflasi Tahunan (%YoY)



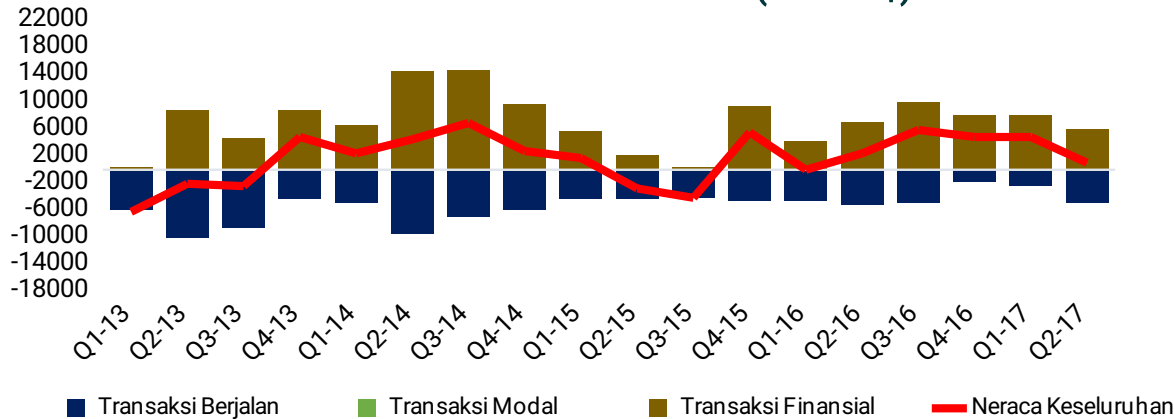
#kerja3ersama

KINERJA SEKTOR EKSTERNAL TERUS MEMBAIK

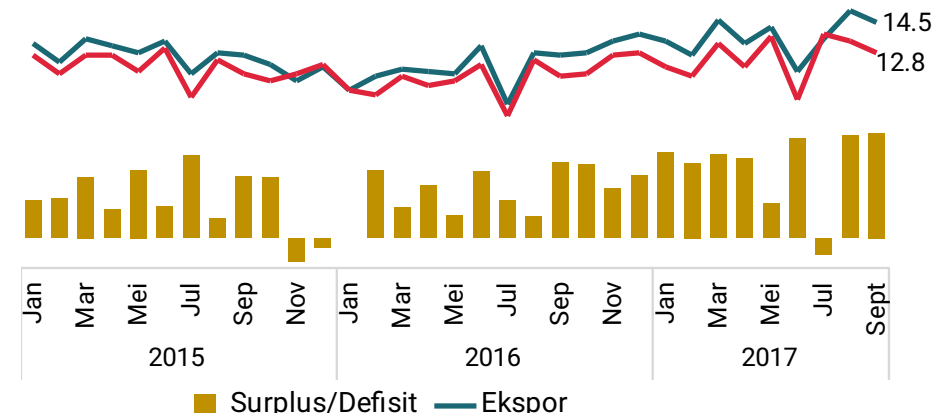


Defisit transaksi berjalan kuartal II 2017 mencapai 2 persen dari PDB, membaik dibandingkan defisit pada kuartal II 2016 (2,3 persen). Selama Januari-September 2017, total surplus perdagangan mencapai 10,9 miliar USD (tertinggi sejak tahun 2012)

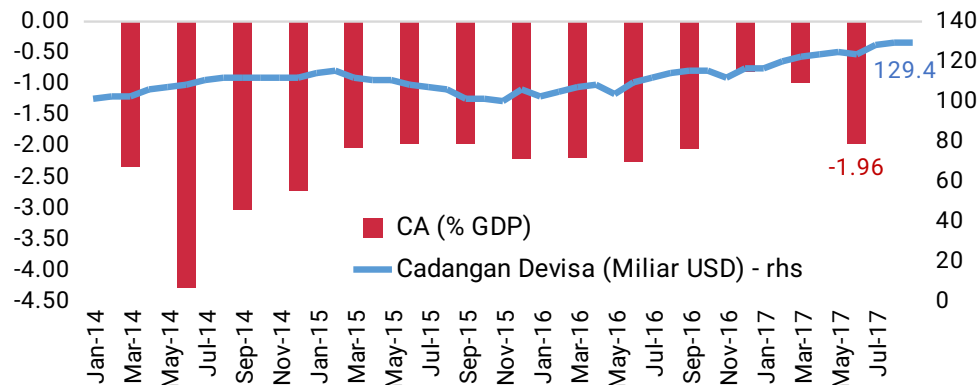
NERACA PEMBAYARAN INDONESIA (Juta US\$)



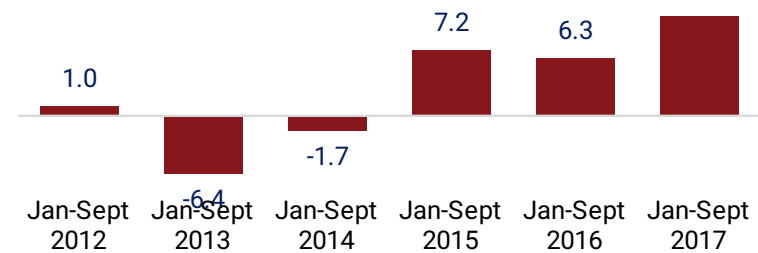
Ekspor Impor (USD Juta)



Defisit Transaksi Berjalan



Neraca Perdagangan Periode Jan-Sept (Miliar USD)

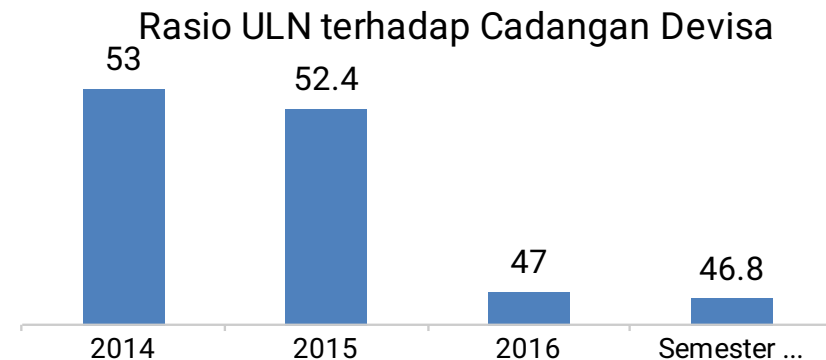
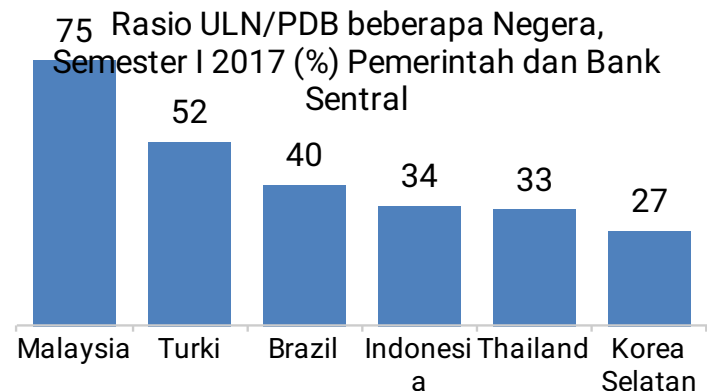
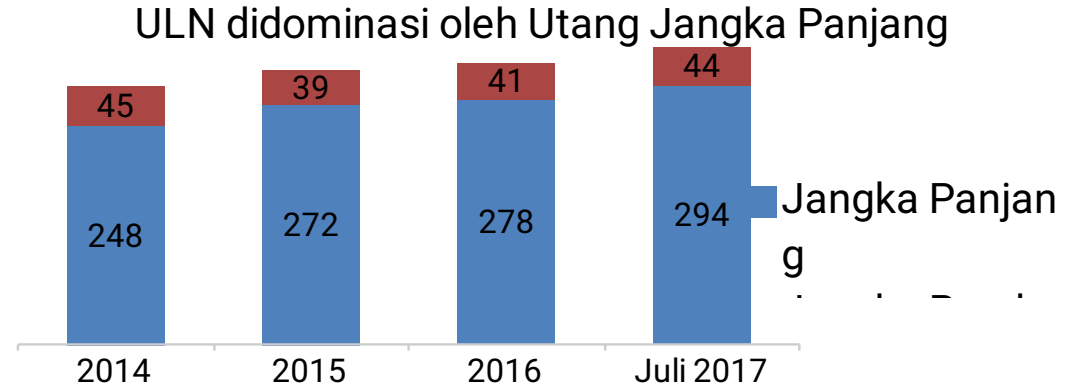
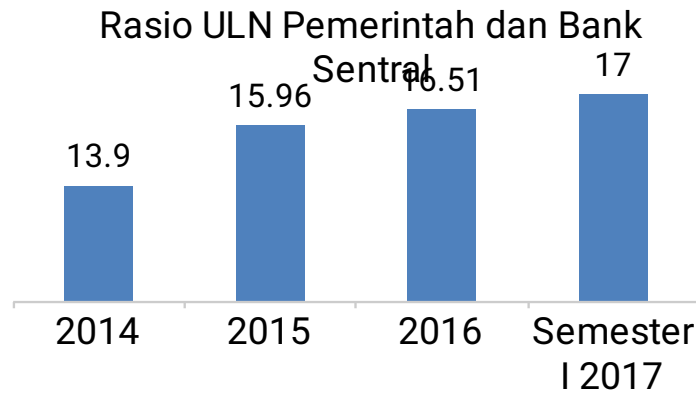


#kerja3ersama

UTANG LUAR NEGERI TERKENDALI



Pemerintah mengelola utang luar negeri (ULN) secara hati-hati dengan kemampuan membayar yang membaik. Batas maksimal utang luar negeri adalah 60% dari PDB (UU 17/2003 tentang Keuangan Negara).



#kerja3ersama

PENINGKATAN DAYA SAING MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN DEREGULASI

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI



“Untuk meningkatkan daya saing industri nasional, ekspor dan investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.”

Pengharmonisasi Regulasi

Menyederhanakan Proses Birokrasi

Memastikan Kepatuhan Hukum

Capaian Paket Kebijakan Ekonomi I - XV

Tahap I, 9 Sept '15

Meningkatkan daya saing industri nasional

Tahap II, 28 Sept '15

Memperbaiki pengendalian perizinan dan menyederhanakan prosedur ekspor

Tahap III, 7 Okt '15

Tertib administrasi keuangan, pendanaan ekspor dan mengeliminasi hambatan teknis

Tahap IV, 15 Okt '15

Lamban sosial dan perbaikan keajaiban ekspor masyarakat

Tahap V, 22 Okt '15

Meningkatkan iklim industri dan investasi melalui tax incentives dan deregulasi beban perpajakan

Tahap VI, 6 Nov '15

Meningkatkan kualitas ekspor melalui daerah terlemba dan memfasilitasi arus barang komoditas strategis

Tahap VII, 7 Des '15

Meningkatkan aktivitas bisnis untuk industri lokal ekspansif yang berskala nasional melalui insentif dalam bentuk proses sertifikasi lahan untuk individu

Tahap VIII, 21 Des '15

Menyediakan perantara lokal untuk bisnis ekspor, mengintegrasikan produk ekspor lokal, memfasilitasi industri perawat domestik

Tahap IX, 27 Jan '16

Mempromosikan kolaborasi, stabilisasi harga dagang dan meningkatkan ekspor logistik untuk makanan

Tahap X, 11 Feb '16

Meningkatkan Daya Saing Investasi dan meningkatkan proteksi untuk UMKM

Tahap XI, 29 Mar '16

Meningkatkan perekonomian nasional melalui fasilitasi UMKM dan Industri

Tahap XII, 28 Apr '16

Meningkatkan ranking Indonesia dalam Fase of Doing Business (FADBI)

Tahap XIII, 24 Agust '16

Free Cash Flowing untuk masyarakat berpenghasilan rendah

Tahap XIV, 10 Nov '16

Reformasi untuk Commerce

Tahap XV, 15 Juni '17

Revisi Undang-undang

9

REGULASI
DICABUT

Untuk
mengurangi
hambatan
perekonomian

31

REGULASI
DIREVISI

Untuk
menghilangkan
pasal tertentu yang
menghambat
perekonomian

49

REGULASI
BARU

Untuk memudahhi
kebijakan baru
yang disusun

35

REGULASI
DIGABUNG

Untuk
menyederhanakan
perizinan dan
peraturan

89

REGULASI
MENCABUT
YANG LAMA


Untuk menyesuaikan peraturan
lama yang sudah tidak relevan

#kerja3ersama


KONSEPSI PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA




Dari memberi izin menjadi melayani (*civil servant*)

1. 
Pengawasan penyelesaian perzinan (end to end)

Dilakukan di semua level pemerintahan (pusat, provinsi, dan daerah)

2a. 
Sistem Checklist Operasi

Di KEK, FTZ, KI, dan KEK Pariwisata tanpa harus menunggu selesainya seluruh proses.

2b. 
Data Sharing

Mengurangi pemberian izin yang berulang

3. 
Reformasi Perizinan Peraturan Berusaha

Termasuk untuk UKM

Lebih sederhana, cepat, dan murah

4. 
Menerapkan Sistem Terintegrasi

sistem perizinan berusaha terintegrasi (single submission) secara on-line

#kerja3ersam

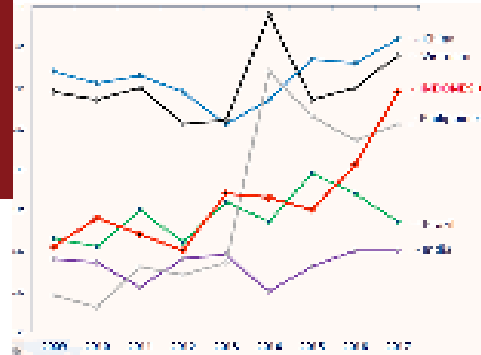


PENINGKATAN DAYA SAING

Indeks Daya Saing Indonesia Naik ke 36

Peringkat GCI Indonesia meningkat dari **41 dari 138** negara pada tahun 2016/2017 menjadi peringkat **36 dari 137 negara** tahun 2017/2018

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Perubahan
Singapore	2	2	2	2	2	2	3	-1 ↓
Japan	9	10	9	6	6	8	9	-1 ↓
Malaysia	21	25	24	20	18	25	23	+2 ↑
China	26	29	29	28	28	28	27	+1 ↑
Thailand	39	38	37	31	32	34	32	+2 ↑
Indonesia	46	50	38	34	37	41	36	+5 ↑
India	56	59	60	71	55	39	40	-1 ↓
Brunei Darussalam	28	28	26	-	-	58	46	+12 ↑
Vietnam	65	75	70	68	56	60	55	+5 ↑
Philippines	75	65	59	52	47	57	56	+1 ↑
Kamboja	97	85	88	95	90	89	94	-5 ↓
Laos	-	-	81	93	83	93	98	-5 ↓



Kemudahan Berbisnis Indonesia Naik ke Peringkat 91

"Indonesia is among the top 10 improvers in Doing Business 2017: Equal Opportunity for All"
-World Bank Group Press Release EODB 2017-

	EODB 2017 Rank	EODB 2016 Rank	Change
Overall	91	106	↑ 15
Starting a business	151	167	↑ 16
Dealing with Construction Permit	116	113	↓ 3
Getting Electricity	49	61	↑ 12
Registering Property	118	123	↑ 5
Getting Credit	62	70	↑ 8
Protecting Minority Investors	70	69	↓ 1
Paying Taxes	104	115	↑ 11
Trading Across Borders	108	113	↑ 5
Enforcing Contracts	166	171	↑ 5
Resolving Insolvency	76	74	↓ 2

SENTIMEN POSITIF DARI LEMBAGA RATING DAN PENINGKATAN INVESTASI



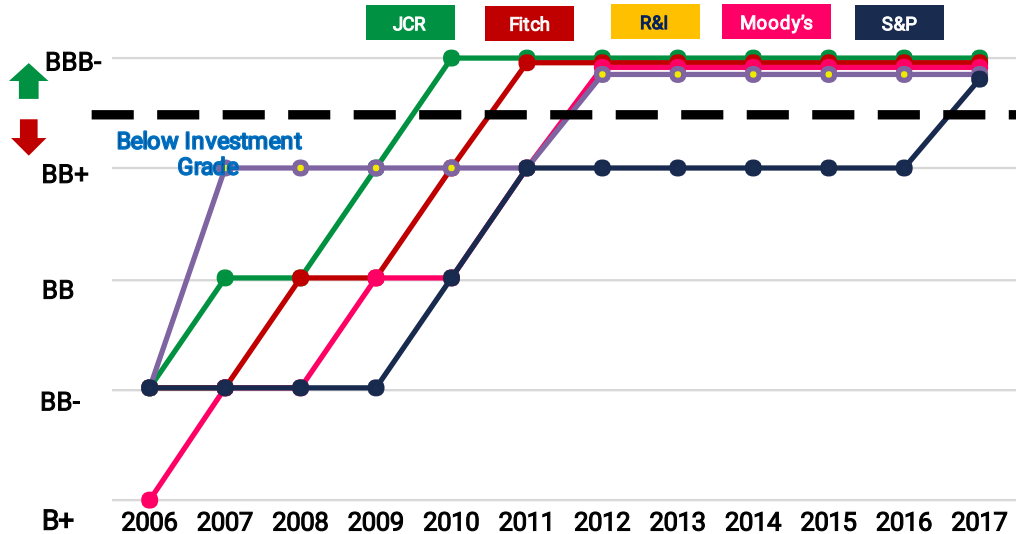
Moody's: meningkatkan outlook dari stabil menjadi positif

R&I: meningkatkan outlook dari stabil menjadi positif

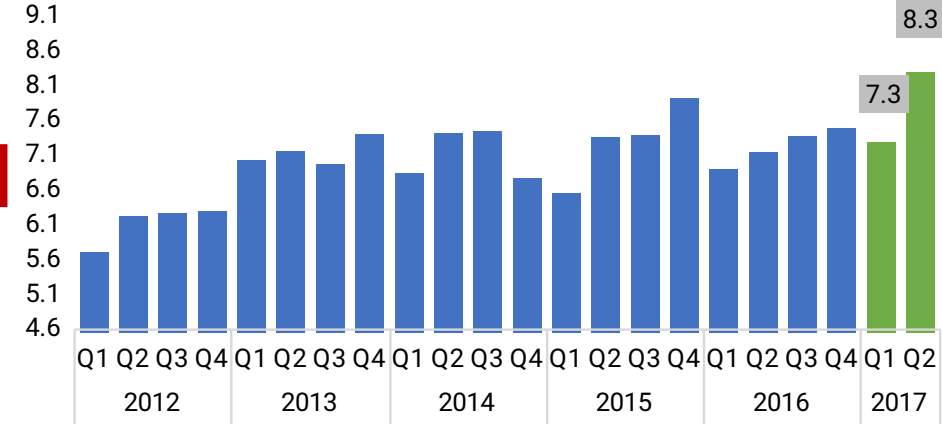
Fitch: meningkatkan outlook dari stabil menjadi positif

JCR: meningkatkan outlook dari stabil menjadi positif

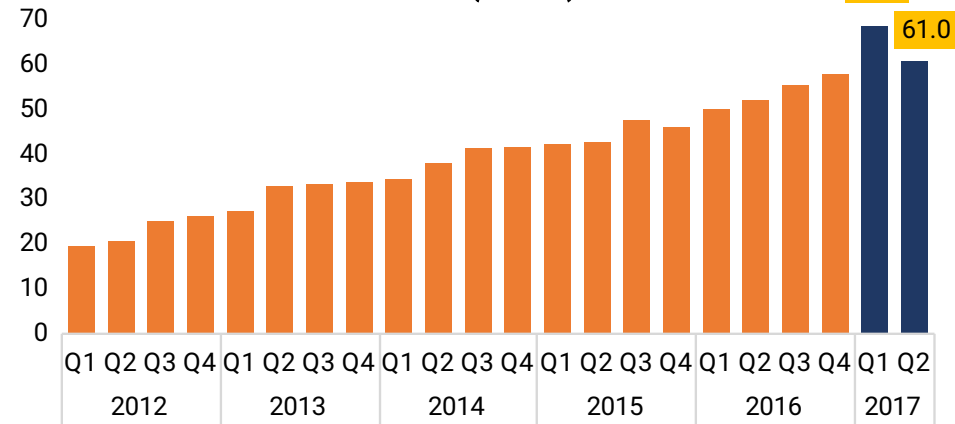
S&P: meningkatkan outlook ke Investment Grade



PMA (Bn USD)



PMDN (Tn IDR)



PEMERATAAN EKONOMI MELALUI PEMBANGUNAN EKONOMI BARU DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

- Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
- Peningkatan Produktivitas

KERANGKA KEBIJAKAN EKONOMI

- Melaksanakan **reforma agraria dan hutan sosial** melalui pendekatan **klaster**, berbasis komoditi unggulan di KBI maupun KTI
- **Redistribusi lahan** sebagai modal masyarakat menengah ke bawah
- **Sertifikasi** dalam rangka legalisasi aset
- Implementasi **kebijakan LP2B**
- Menyediakan **hunian penduduk miskin** perkotaan.

5 Kebijakan Ekonomi (Quick Win)

Membangun infrastruktur strategis dan prioritas: pelabuhan, bandara, bus rapid transit, kereta api, jalan baru, listrik, bendungan, dan kilang minyak

Infrastruktur

Akses terhadap lahan

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kesempatan Bekerja/ Berusaha

Bantuan Sosial

Reformulasi dan penajaman kebijakan pengembangan industri manufaktur, pariwisata, perdagangan dan perikanan

- **Reformasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja** menjadi **pendidikan dan pelatihan vokasi** berbasis pekerjaan. Dimulai dari sektor industri, diikuti sektor jasa dan pertanian, melalui kerjasama Pemerintah, BUMN dan Swasta.
- **Kewirausahaan** untuk mendorong terciptanya pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai daya saing. Mendorong pelaku usaha mikro dan kecil berkembang menjadi pelaku usaha menengah dan besar.

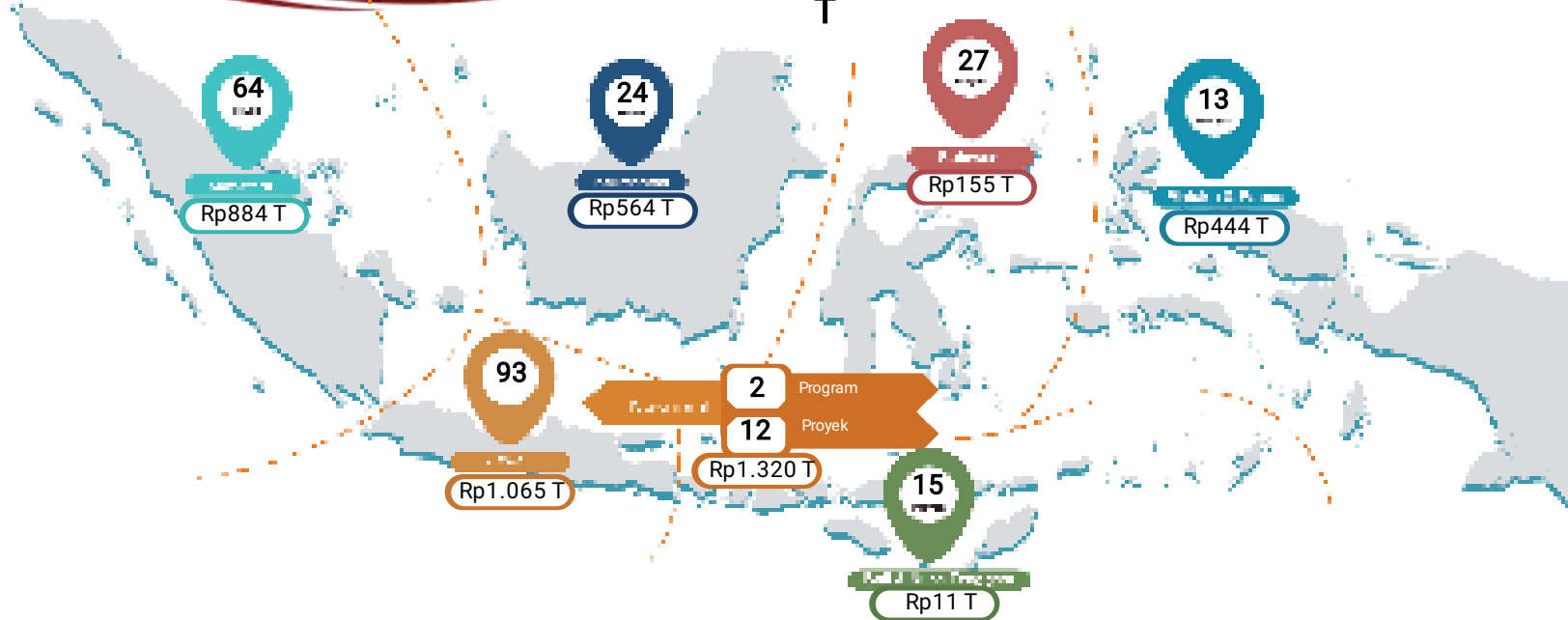
Mentransformasi skema subsidi secara bertahap menjadi **bantuan tepat sasaran**, tepat waktu, dan tepat jumlah, serta menyatukannya dengan semua bentuk bantuan sosial

#kerja3ersama

PEMERATAAN EKONOMI MELALUI PEMBANGUNAN EKONOMI BARU DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Daftar PSN direvisi melalui Perpres No. 3/2016 j.o Perpres No.58/2017, mencakup 245 Proyek + 2 Program, dengan estimasi total nilai investasi Rp 4.197 T



Proyek mencakup 15 sektor proyek serta 2 sektor program

Category	Sector	Count
Proyek	JALAN	74 PROYEK
	KERETA	23 PROYEK
	PELAGUHAN	10 PROYEK
	DAYA DAP. MUDA	8 PROYEK
	KAWASAH	30 PROYEK
	PERUMAHAN	3 PROYEK
	FLDH	3 PROYEK
	PENGELOLAAN AIR	9 PROYEK
	SDH DAN RUMAH	54 PROYEK
	IRIGASI	7 PROYEK
	TEKNOLOGI	4 PROYEK
	SMELTER	6 PROYEK
	ENERGI	12 PROYEK
	PERTAHANAN KELAUTAN	1 PROYEK
	ITANGGULLAUT	1 PROYEK
Program	LISTRIK	1 PROGRAM
	INDUSTRI PESAWAT	1 PROGRAM

#kerja3ersama

PEMERATAAN EKONOMI MELALUI PEMBANGUNAN EKONOMI BARU DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS

Peningkatan Produktivitas

KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI



Perbaikan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak akan berkelanjutan jika tidak didukung dengan kebijakan pemerataan ekonomi



KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI

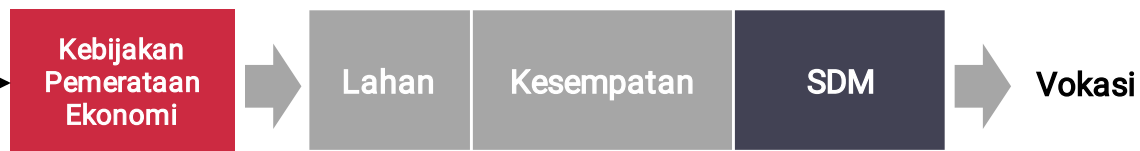
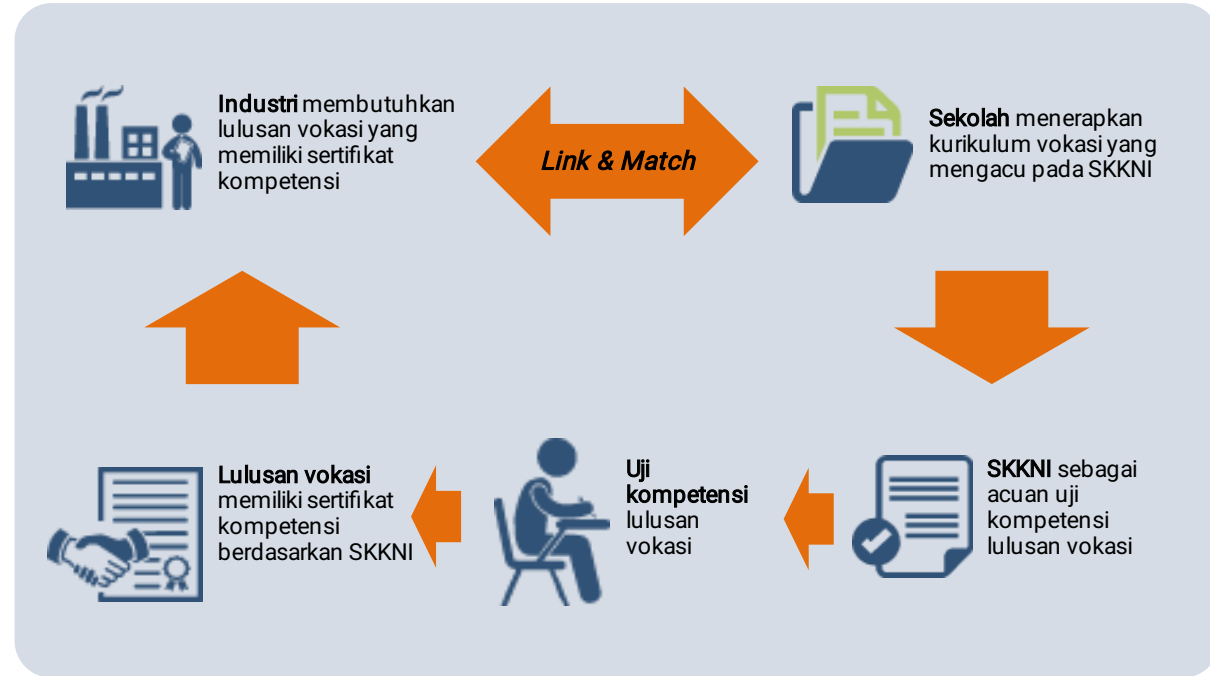
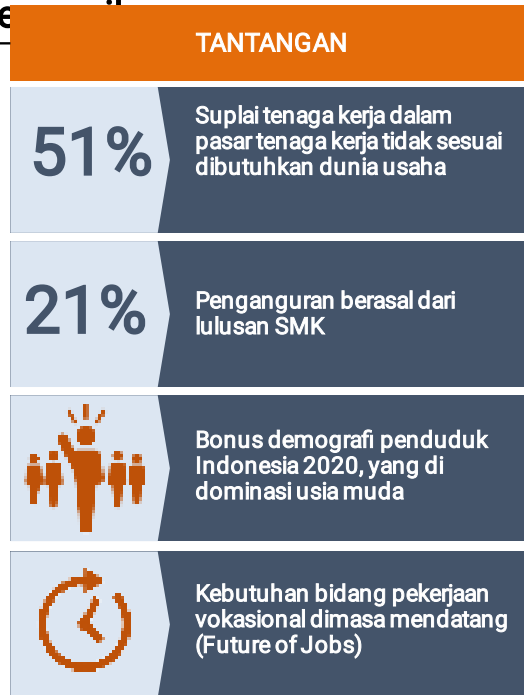
Prioritas



LINK AND MATCH PENDIDIKAN VOKASI & DUDI



Pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi isu prioritas nasional untuk menyelesaikan persoalan penyediaan tenaga kerja

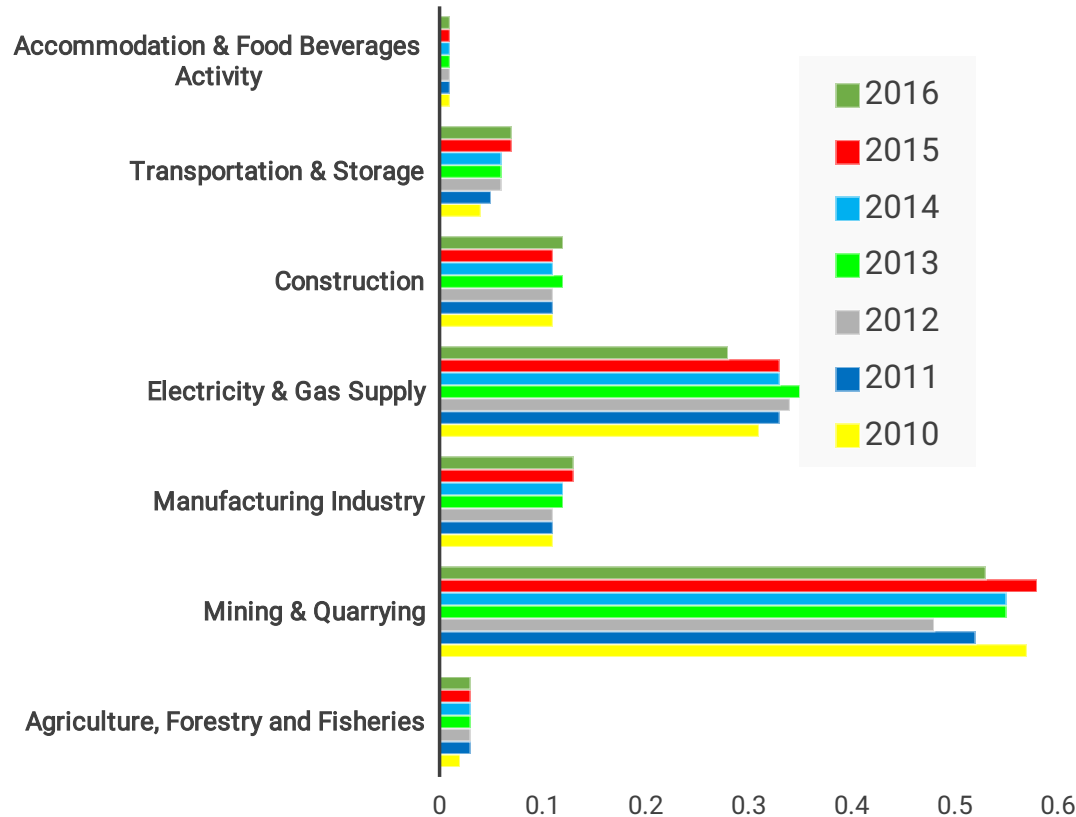


- | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Perubahan Kurikulum SMK | 2. Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi | 4. Terlalu Banyak Program Studi |
| | 3. Kebutuhan Peralatan Minimal | 5. Insentif Bagi Sekolah |

PRODUKTIVITAS ANTAR SEKTOR UNTUK Mendukung Kebijakan Vokasi

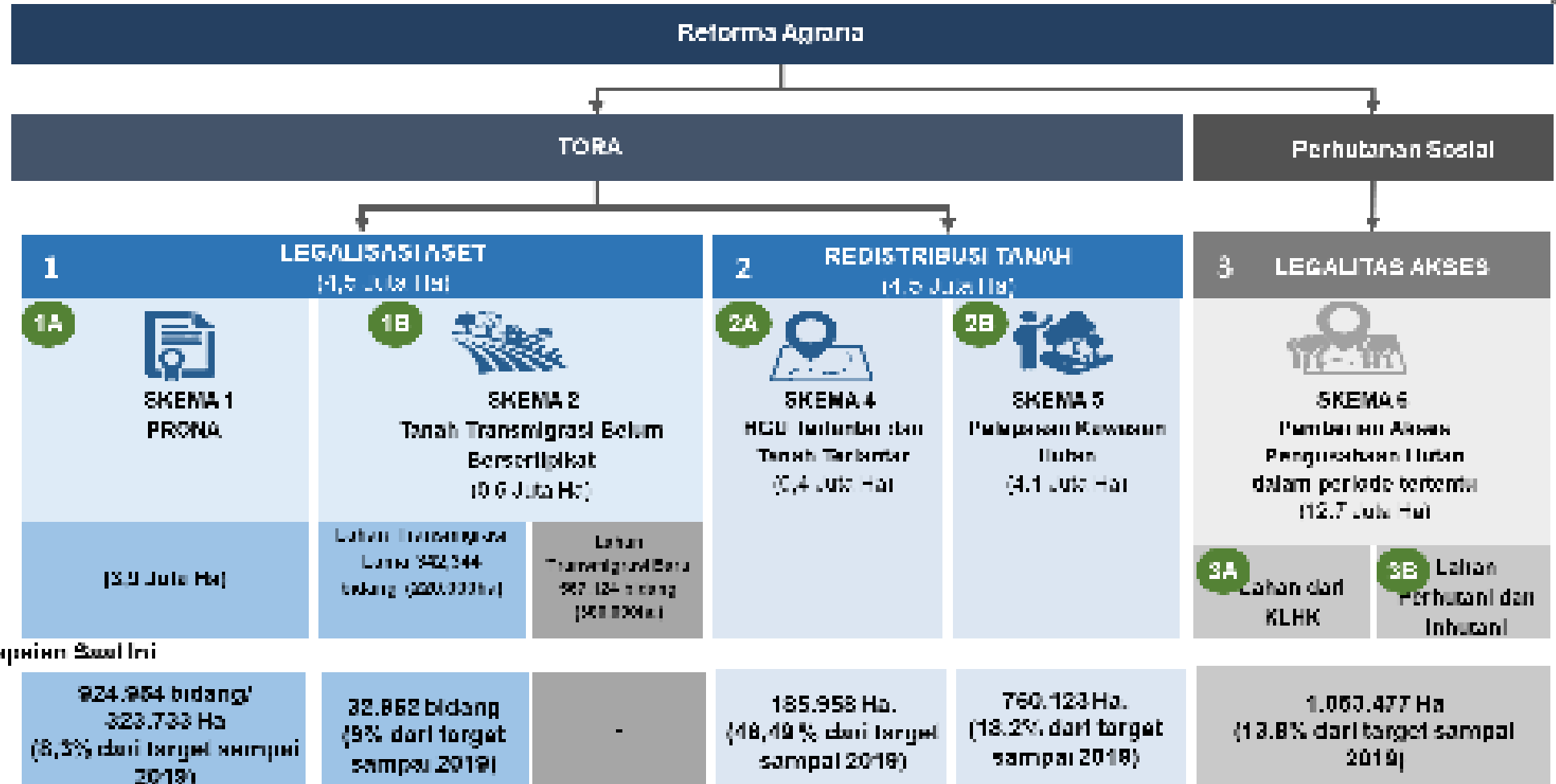


Produktivitas Sektoral (PDB (Rp Miliar)/Tenaga Kerja)



PILAR 5-10		SCORE				RANGKING	
		2014	2015	2016	2017	2016/2017	2017/2018
5	Higher Education and Training	4.53	4.45	4.50	4.52	63	64
6	Goods Market Efficiency	4.54	4.43	4.40	4.59	58	43
7	Labour Market Efficiency	3.81	3.74	3.80	3.91	108	96
8	Financial Market Development	4.45	4.19	4.33	4.50	42	37
9	Technological Readiness	3.58	3.49	3.54	3.86	91	80
10	Market Size	5.34	5.74	5.71	5.73	10	9
AVERAGE		4.38	4.34	4.38	4.52	49	41

TARGET REFORMA AGRARIA DAN PERHUTANAN SOSIAL



Cuplikan Awal Ini

#kerja3ersama



PERKEMBANGAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) 2007-2017

2015

Suku Bunga 12%

Plafon : KUR Mikro s.d. Rp 25 Juta,
KUR Ritel Rp 500 Juta

7 Bank Pelaksana, 2 Perusahaan
Penjamin;

Total Penyaluran per Des 2015
sebesar Rp 22,75 Triliun dengan 1
juta akad kredit. (75,9% dari target)

2016

Suku Bunga 9%

Plafon : KUR Mikro s.d. Rp 25 Juta,
KUR Ritel Rp 500 Juta

26 Bank, 2 Perusahaan
Pembiayaan; 10 Penjamin

Total Penyaluran per Des 2016 Rp
94,4 triliun dengan 4,3 juta akad
kredit. (94% dari target). NPL =
0.37%

2017

Suku Bunga 9%

Plafon : KUR Mikro s.d. Rp 25 Juta,
KUR Ritel Rp 500 Juta

33 Bank, 4 Perusahaan
Pembiayaan, 1 Koperasi Simpan
Pinjam; 10 Penjamin

Target penyaluran KUR tahun
2017 sebesar Rp110Triliun,
dengan porsi KUR Mikro 81%, KUR
Ritel 18%, dan KUR TKI 1%.

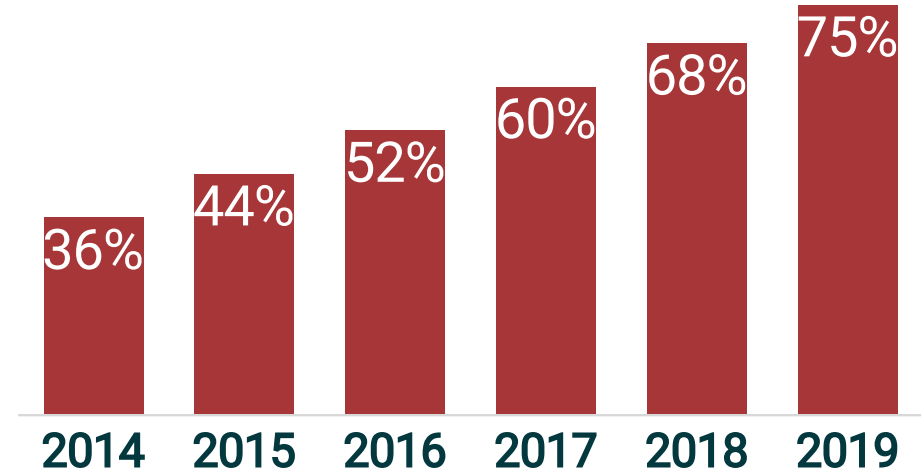
PENINGKATAN KEUANGAN INKLUSIF UNTUK SELURUH MASYARAKAT INDONESIA



Indikator Keuangan Inklusif di Indonesia

Indikator Keuangan Inklusif		Juni 2016	Juni 2017	Perubahan
AKSES	1. Kantor layanan bank per 100.000 penduduk dewasa (unit)	16	16	0%
	2. Jumlah agen USD per 100.000 penduduk dewasa (unit)	54	84	56%
PENYAJAAN	1. Jumlah rekening simpanan di bank per 1.000 penduduk dewasa (rekening)	972	1.162	20%
	2. Jumlah rekening giro di bank per 1.000 penduduk dewasa (rekening)	220	234	7%
KUALITAS	1. Indeks Literasi Keuangan (%)	71,64 (2013)	79,66 (2016)	10%
	2. Persentase pengaduan layanan keuangan yang diselesaikan (%)	100% (akumulasi Jan 13 - Jun 16)	99% (akumulasi Jan 13 - Jun 17)	6%

Proyeksi Indeks Keuangan Inklusif Global Findex



Perpres No. 63 Tahun 2017

Pokja terdiri dari:

1. Pokja 1 – Edukasi Keuangan
2. Pokja 2 – Hak Properti Masyarakat
3. Pokja 3 – Fasilitasi Intermediasi & Saluran Distribusi Keuangan
4. Pokja 4 – Pelayanan Keuangan Sektor Pemerintah
5. Pokja 5 – Perlindungan Konsumen
6. Pokja 6 – Kebijakan dan Regulasi
7. Pokja 7 - Infrastruktur & Teknologi Informasi Keuangan

1. Target ditentukan berdasarkan ekspektasi bahwa indeks keuangan inklusif akan naik sebesar 8% per tahun (2015-2019) untuk mencapai target utama indeks keuangan inklusif 75% pada tahun 2019.
2. Pengertian tingkat Keuangan Inklusif adalah persentase jumlah orang dewasa yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal
3. Acuan tingkat Keuangan Inklusif 2014 adalah menggunakan angka World Bank Group Financial Inclusion Index
4. Survey Literasi Keuangan dan Keuangan Inklusif OJK tahun 2016 menunjukkan bahwa angka Keuangan Inklusif telah mencapai 63%: <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/DetailMateri/250>

#kerja3ersama

LAMPIRAN: KREDIT USAHA RAKYAT

Perkembangan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2007-2017



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PERENCANAAN
REPUBLIK INDONESIA



2007 - 2014

- Skema subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) = 3.25%;
- Suku Bunga: KUR Mikro 22%, KUR Ritel 13% , KUR TKI 22%
- Target penerima : UMKM di seluruh sektor ekonomi dan TKI
- Plafon : KUR Mikro s.d. Rp 20 Juta, KUR Ritel Rp 500 Juta
- Risk Sharing: 70% - 30% (sektor non prioritas), 80% - 20% (sektor prioritas)
- 33 Bank Pelaksana, 4 Penjamin;
- Pengawasan oleh Bank Indonesia dan BPKP.
- **Total Penyaluran Rp 178 Triliun dengan 12,4 juta akad kredit. NPL = 3.3%**
- Baki debit s.d. Des'16 Rp 34,5 triliun.

2015

- Skema subsidi bunga
- Suku Bunga 12%
- Subsidi bunga: KUR Mikro 7%, KUR Ritel 3%, KUR Penempatan TKI 12%(termasuk *collection fee*)
- Target penerima: UMKM di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa
- Plafon : KUR Mikro s.d. Rp 25 Juta, KUR Ritel Rp 500 Juta
- *Risk Sharing*: B2B
- Pelaksana
- 7 Bank Pelaksana, 2 Perusahaan Penjamin;
- Pengawasan oleh OJK dan BPKP.
- **Total Penyaluran per Des 2015 sebesar Rp 22,75 Triliun dengan 1 juta akad kredit. (75,9% dari target)**
- Baki debit s.d. Des'16 Rp 17,03 triliun.

2016

- Skema subsidi bunga
- Suku Bunga 9%
- Subsidi bunga: KUR Mikro 10%, KUR Ritel 4,5%, KUR Penempatan TKI 12%(termasuk *collection fee*)
- Target penerima: UMKM di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa
- Plafon : KUR Mikro s.d. Rp 25 Juta, KUR Ritel Rp 500 Juta
- Tarif IJP: B2B (1,5%)
- Pelaksana
- 26 Bank, 2 Perusahaan Pembiayaan
- 10 Penjamin
- Pengawasan oleh OJK dan BPKP.
- **Total Penyaluran per Des 2016 Rp 94,4 triliun dengan 4,3 juta akad kredit. (94% dari target). NPL = 0.37%**
- Baki debit s.d. Des'16 Rp 70,6 triliun.



2017

- Skema subsidi bunga
- Suku Bunga 9%
- Subsidi bunga: KUR Mikro 9,5%, KUR Ritel 4,5%, KUR Penempatan TKI 12%(termasuk *collection fee*)
- Target penerima: UMKM di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa
- Plafon : KUR Mikro s.d. Rp 25 Juta, KUR Ritel Rp 500 Juta
- Tarif IJP = B2B (1,75% untuk KUR Mikro, 1,5% untuk KUR Ritel dan KUR TKI)
- Pelaksana
- 33 Bank, 4 Perusahaan Pembiayaan, 1 Koperasi Simpan Pinjam
- 10 Penjamin
- **Target penyaluran KUR tahun 2017 sebesar Rp110Triliun**, dengan porsi KUR Mikro 81%, KUR Ritel 18%, dan KUR TKI 1%.

Porsi KUR sektor produksi ditargetkan sebesar 40%.

#kerja3ersama

Penyaluran KUR berdasarkan Sektor Ekonomi Posisi 30 September 2017



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

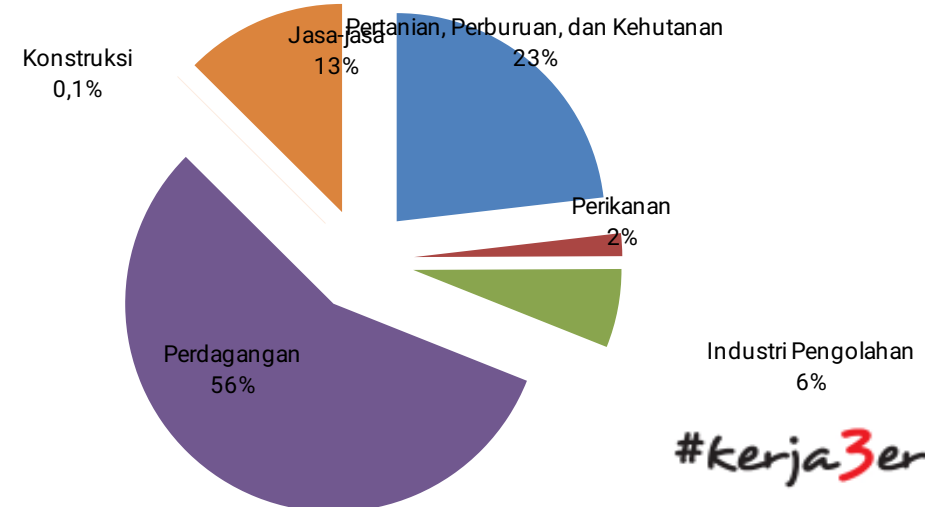
Penyaluran KUR untuk sektor produksi terus meningkat yaitu: *(target porsi penyaluran KUR sektor produksi tahun 2017 sebesar 40%)*

- Sektor pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa – jasa = 44,8%
- Sektor pertanian, perikanan, industri, konstruksi = 31,7%

No	Sektor Ekonomi	KUR Mikro				KUR Kecil				Total			
		Desember 2016		Juli 2017		Desember 2016		Juli 2017		Desember 2016		Sep-17	
		Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%	Rp. Juta	%
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	14,200,627	22	10,663,720	24	2,163,159	8	3,229,088	20	16,363,786	17	13,892,808	23
2	Perikanan	870,294	1	681,000	2	276,673	1	380,173	2	1,146,966	1	1,061,173	2
3	Industri Pengolahan	2,826,427	4	1,973,148	5	1,039,847	4	1,689,631	10	3,866,275	4	3,662,779	6
4	Perdagangan	41,289,257	63	25,550,900	59	21,186,588	74	8,295,616	50	62,483,026	66	33,846,515	56
5	Konstruksi			1,095	0.003			2,400	0.01			3,495	0.006
6	Jasa-jasa	6,345,590	10	4,665,393	11	3,888,461	14	2,854,207	17	10,401,382	11	7,519,599	13
	Total	65,532,194	100	43,535,256	100	2,855,4728	100	16,451,114	100	94,261,434	100	59,986,370	100

Ket:

	Dengan sektor jasa – jasa	Tanpa Sektor Jasa - jasa
Sektor Produksi	44.8%	31.7%
Sektor Non Produksi	55.2%	68.3%



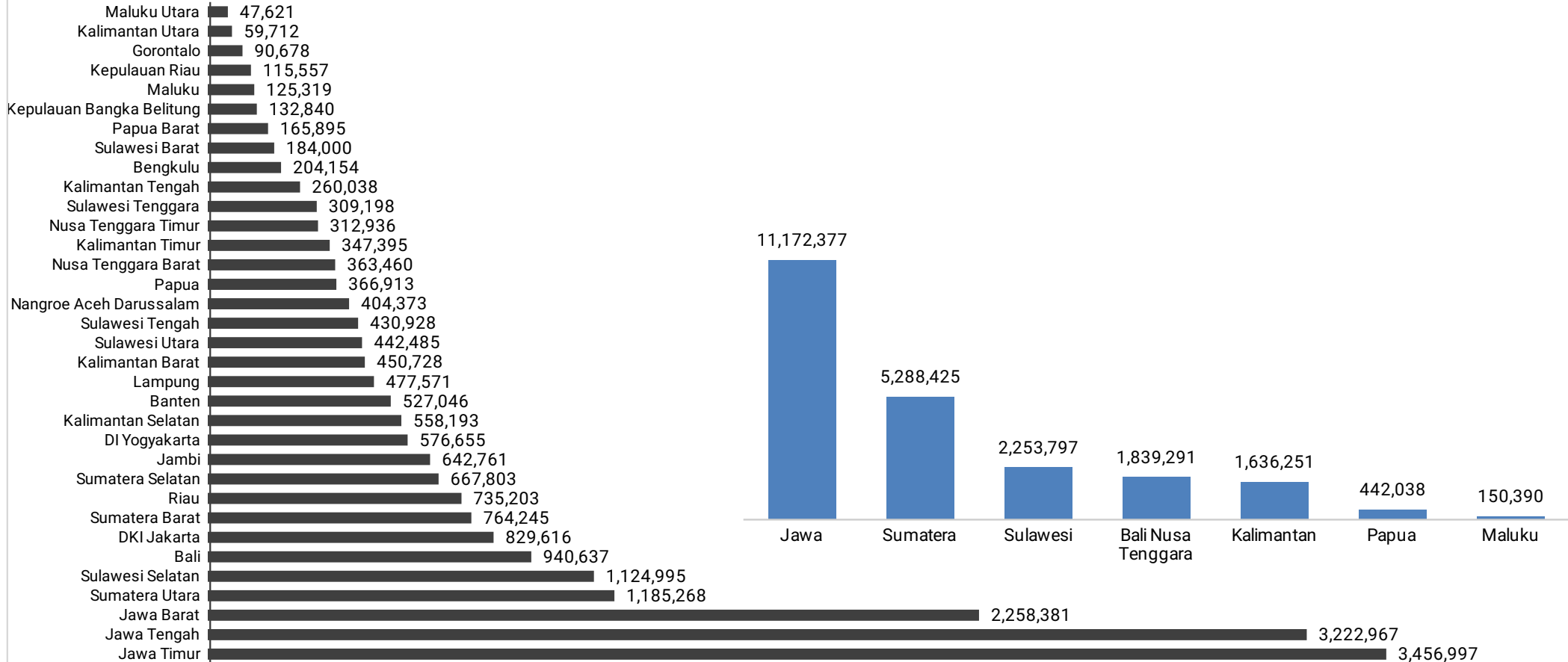
Penyaluran KUR untuk sektor produksi terus meningkat, pada Agustus 2017 tercatat porsi penyaluran KUR sektor produksi (pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa - jasa) sebesar 44% sedangkan sektor produksi (pertanian, perikanan, industri, konstruksi) sebesar 31%. Capaian tersebut meningkat dari kinerja Desember 2016 dengan porsi penyaluran KUR sektor produksi sebesar 22%.

#kerja3ersama

Penyaluran KUR berdasarkan Provinsi posisi 30 September 2017



Penyaluran KUR s.d. 31 September 2017 Berdasarkan Provinsi



Arah Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)



KEMERDEKAAN EKONOMI MELALUI PEREKONOMIAN
Cukupkan dan laksanakan program polikredit berupa KUR yang dapat dilakukan secara langsung serta secara tidak langsung

EVALUASI SIKLUS BUNGAWARJIN KUR

Revisi dan evaluasi kebijakan KUR, khususnya mengenai
Laju bunga polikredit yang harus diupayakan serendah mungkin
KUR Tahun 2016 yang semula yaitu sebesar Rp. 11,50%T

KUR UNTUK OPTIMALISASI KUBE

Mendukung semua KUR untuk optimalisasi Kube yang
Berusaha (KUR) yang memiliki usaha berwawasanperda-
sahan

PENYESUAIAN RUTAN KUR RITEL MENJADI KUR MEREK
Dalam rangka meningkatkan daya saing produk rumah tangga lokal KUR
Dititikatkan untuk diarahkan menjadi KUR Fasilitas produksi lokal
sahan

KUR UNTUK MASYARAKAT DAERAH PERUBAHAN
Dalam rangka pengkajian dan optimalisasi keuangan, dilakukan melalui
sasaran dan daya saing produk rumah tangga lokal yang memiliki usaha
sasaran dan daya saing produk rumah tangga lokal yang memiliki usaha
masyarakat daerah perbatasan

TOTAL AKUMULASI PLAFON KUR MIKRO

Tidak akan lebih melebihi total plafon total plafon 41% HRP,
Tetapi pada tahun ini mencapai 41% plafon total

KUR PERHIMPATAN TKU

Bergabung dengan semua biaya lain – lain yang dapat dibebankan
dari Biaya KUR Perhimpunan TKU dan kelebihan setelah dari
sasaran dan daya saing produk rumah tangga lokal

KCOLAKAN KE DERAH KREDIT USAHA RAKYAT

**PENYESUAIAN SIFAT
KUR DENGAN
KEBUTUHAN SEKTOR
PENDAYAKAN USAHA
MIKRO DAN RUMAH**

**MEMASUKKAN SEKTOR
SEKTOR EKONOMI LUMAS
USAH YANG ISELIN MASUK
KE KATPARI SEKTOR
EKONOMI YANG DATAP
DI BAYAI OLEH KUR**

**MEMPERMUDAH
PENJUSANA MIKRO DAN
KUR UTANG
MENDAPATKAN ANGES
KREDIT PERUSAHA
DENGAN SIKLUS BUNGA
MENDAH MELALUI KUR**

KELAYAKAN USAHA

penyediaan dana untuk kegiatan usaha perantara KUR sebagai
sasaran dan daya saing produk rumah tangga lokal yang memiliki
Meningkatkan daya saing produk rumah tangga lokal yang memiliki
Mekanisme pembayaran kredit berdasarkan analisis
tingkat risiko

KUR KHUSUS

untuk 41% yang meliputi kegiatan usaha mikro dan rumah tangga
kegiatan usaha yang UMKH di sektor produksi rumah tangga lokal
sasaran dan daya saing produk rumah tangga lokal yang memiliki
dan daya saing produk rumah tangga lokal yang memiliki
kegiatan usaha yang

PENINGKATAN PENYALURAN KUR KE SEKTOR MIKROUMI

Peningkatan KUR diarahkan pada sektor mikro (perantara,
sasaran dan daya saing produk rumah tangga lokal yang memiliki
KUR yang lebih merupakan target 40% di sektor produksi
yang dilakukan maka penerapannya akan diarahkan pada sektor
sasaran dan daya saing produk rumah tangga lokal

PENYALURAN KUR BERSAMAAN DENGAN KREDIT LAIN YANG DIHAKSI PERUSAHA

Untuk penyaluran KUR dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan
yang bukan KUR pada penyaluran sama, kredit kepemilikan
rumah, kredit usaha dan hankam, kredit usaha dan kredit usaha
kegiatan usaha yang

KUR SEMUA MULTISEKTOR

Meningkatkan penyaluran produk rumah tangga lokal KUR yang
meningkatkan daya saing produk rumah tangga lokal yang memiliki
sasaran dan daya saing produk rumah tangga lokal yang memiliki
kegiatan usaha yang

#kerja3ersama



#kerja**3**ersama

TERIMA KASIH